



PEMERINTAH
KOTA BANJARBARU

LAPORAN TAHUNAN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG

BAB I

PENDAHULUAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Banjarbaru merupakan salah satu perangkat Pemerintah Kota Banjarbaru yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bertolak dari tugas tersebut dan sejalan dengan Visi Kota Banjarbaru yaitu: “BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)” dan Misi dari Kota Banjarbaru adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah.

Visi dan Misi Kota Banjarbaru tersebut perlu diikuti dengan meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih berdayaguna dan berhasil guna dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarbaru.

Maksud penyusunan Laporan ini, adalah merupakan Laporan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan kegiatan Dinas dalam rangka pelaksanaan misinya berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan, selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2023. Adapun tujuannya adalah :

1. Mengukur pencapaian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, masukan dalam peningkatan kinerja dinas;
2. Memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja dinas, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan yang dihadapi, dan kesimpulan capaian kinerja dinas;
3. Menjadi bahan evaluasi dan perbaikan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi guna peningkatan kinerja dinas.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 8) ; dan

9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarbaru;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru; dan
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas di Lingkungan Pemerintahan Kota Banjarbaru;
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
14. Surat Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Nomor 100/0042/Pem-setda tanggal 10 Januari 2023 tentang Laporan Tahunan SKPD.
15. Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru.

B. GAMBARAN UMUM SKPD

1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 Tahun 2016, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Pekerjaan Umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyederhanaan birokrasi yang optimal, perlu disusun tata cara Penyederhanaan Struktur Organisasi sebagai pedoman bagi Instansi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi.

Memutuskan Peraturan Walikota tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Banjarbaru yaitu Peraturan Walikota Nomor 69 tahun 2021 yang ditetapkan di Banjarbaru pada Tanggal 28 Desember 2021.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

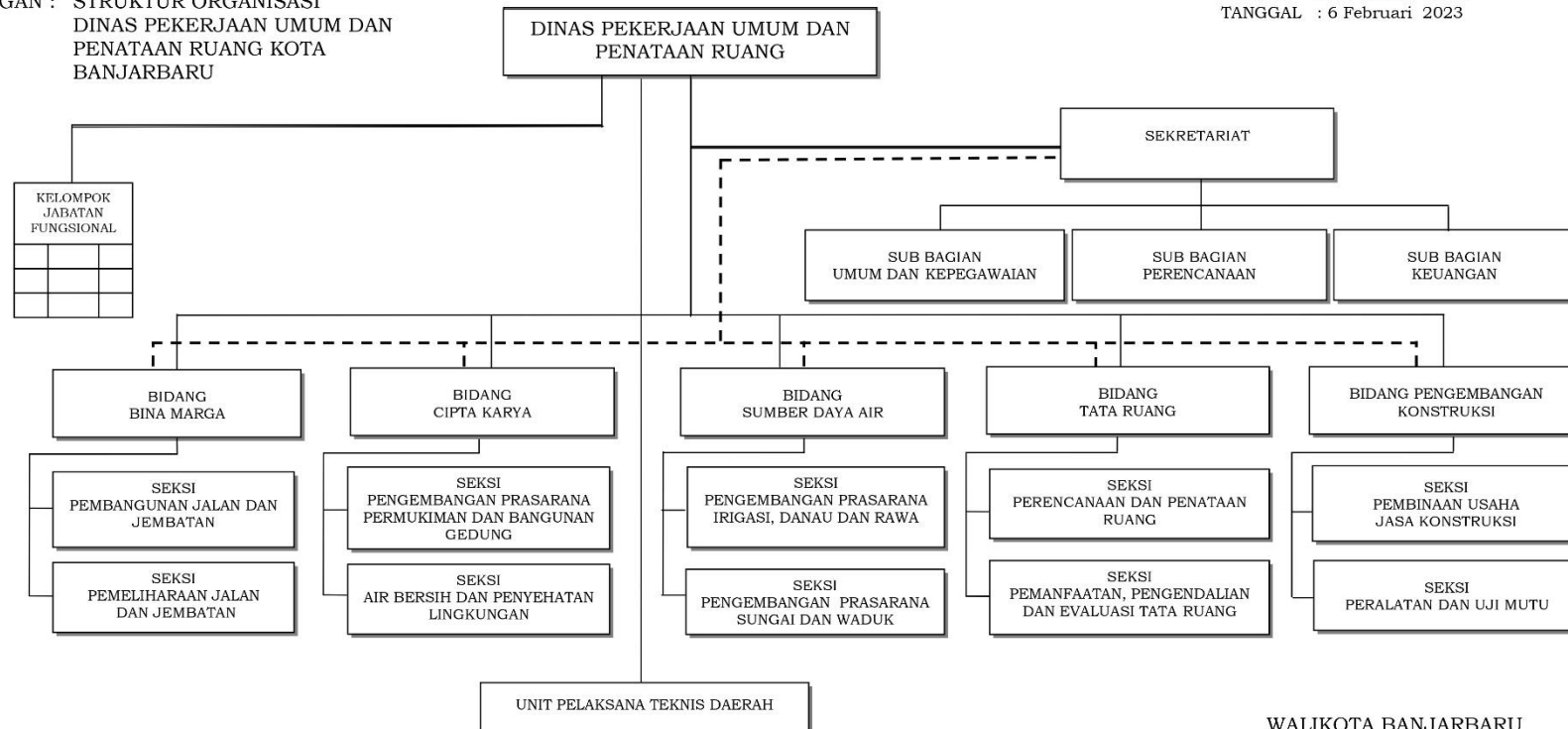
2. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perencanaan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- d. Bidang Bina Marga terdiri dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- e. Bidang Cipta Karya terdiri dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- f. Bidang Tata Ruang terdiri dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi.
- g. Bidang Pengembangan Konstruksi terdiri dari Kepala Bidang dan Kepala Seksi.

BAGAN : STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA
BANJARBARU

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU
NOMOR : 16 TAHUN 2023
TANGGAL : 6 Februari 2023



KETERANGAN :
 — : Garis Komando
 - - - : Garis Koordinasi

WALIKOTA BANJARBARU

TTD

M. ADITYA MUFTI ARIFFIN

1.1. Keadaan Pegawai

Jumlah PNS pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Banjarbaru sebanyak 56 orang, terdiri dari 32 orang laki-laki dan 24 orang perempuan. Berdasarkan golongan ruang, PNS DPUPR terdiri dari 12 orang Golongan IV, 34 orang Golongan III dan 10 orang Golongan II (Tabel 1). Sedangkan jumlah Pegawai (PNS dan Tenaga Kontrak) berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 58 orang laki-laki dan 45 orang perempuan. Pegawai dengan latar belakang Pendidikan S-2 sebanyak 14 orang, S-1 sebanyak 54 orang, D-IV sebanyak 1 orang, D-III sebanyak 14 orang, dan SLTA sebanyak 20 orang (Tabel 2).

Tabel. 1

**DATA PNS DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
TAHUN 2023**

No.	Golongan Ruang	Jumlah Orang	Keterangan	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Golongan IV	12 orang	7 orang	5 orang
2	Golongan III	34 orang	21 orang	13 orang
3	Golongan II	10 orang	4 orang	6 orang
4	Golongan I	-	-	-
Jumlah		56 orang	32 orang	24 orang

Tabel.2

**DATA PEGAWAI (PNS, PPPK, DAN TENAGA KONTRAK)
DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
TAHUN 2023**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai	Keterangan	
			Laki-Laki	Perempuan
1	Sarjana Strata 2 (S-2)	14 orang	8 orang	6 orang
2	Sarjana Strata 1 (S-1)	54 orang	27 orang	27 orang
3	Diploma IV	1 orang	1 orang	-
4	Diploma III	14 orang	7 orang	7 orang
5	SLTA	20 orang	15 orang	5 orang
6	SLTP	-	-	-
7	SD	-	-	-
Jumlah		103 orang	58 orang	45 orang

Keadaan pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru selama Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut yang memuat Nama dan Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru keseluruhan berdasarkan Jabatan, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, Golongan dan Usia.

Tabel 3.
NAMA PEGAWAI (PNS, PTT, DAN TENAGA KONTRAK)
DINAS PEKERJAAN UMUM TAHUN 2023

No.	Nama / NIP / NIPPPK / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
1	Eka Yuliesda Akbari, ST, MT 19730727 199803 2 008	Kepala Dinas	S2	Pembina Tk.I	IV/b	50
2	Ir. Abdussamad, ST, MT 19730927 199811 1 001	Sekretaris	S2	Pembina Tk.I	IV/b	50
3	Zabidi Anshari, ST, MT 19690228 199703 1 010	Fungsional Pembina Jasa Konstruksi Madya	S2	Pembina Utama Muda	IV/c	54
4	Subrianto, ST, MT 19710731 199303 1003	Kepala Bidang Sumber Daya Air	S2	Pembina	IV/a	52
5	M. Adi Maulana, ST, MT 19831125 200604 1 005	Kepala Bidang Bina Marga	S2	Pembina	IV/a	40
6	Nina Aprodita, ST, MT 19780410 200701 2 014	Kepala Bidang Cipta Karya	S2	Pembina	IV/a	45
7	Akhmad Syahidan, S.Pi, M.Ec.Dev 19721031 199703 1 003	Kepala Bidang Tata Ruang	S2	Pembina	IV/a	51
8	Sumaryono, ST, MT 19680726 199603 1 004	Kepala Bidang Pengembangan Konstruksi	S2	Pembina	IV/a	55
9	Alip, S.Sos 19670622 199803 1 007	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	S1	Penata Tk. I	III/d	56
10	Henny Rachmaniar, ST 19770917 200701 2 014	Kasubbag Perencanaan	S1	Penata Tk. I	III/d	46
11	Indra Sumargo, SE 19730506 200901 1 003	Kasubbag Keuangan	S1	Penata Tk. I	III/d	50

No.	Nama / NIP / NIPPPK / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
12	Pieta Widhiasari, ST, MT 19811022 200604 2 012	Kasi Pengembangan Pras. Sungai dan Waduk	S2	Pembina	IV/a	42
13	Benny Surya Atmaja, ST, MT 19770811 201101 1 002	Kasi Pengembangan Pras. Irigasi, Danau & Rawa	S2	Penata	III/c	46
14	Wahyuni, ST 19770418 199803 1 006	Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan	S1	Penata Tk. I	III/d	46
15	Rusna Apriani, ST, M.T. 19770419 200701 2 009	Kasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	S2	Pembina	IV/a	46
16	Rahmat Juliani, ST 19750701 200604 1 018	Kasi Pengembangan Permukiman dan Bangunan	S1	Penata Tk. I	III/d	48
17	Achmad Rizani, ST 19720527 200604 1 013	Kasi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	S1	Penata Tk. I	III/d	51
18	Poppy Syofia Yunidar Marthiana, ST, MT 19820603 200604 2 030	Kasi Perencanaan dan Penataan Ruang	S2	Pembina	IV/a	41
19	M. Aulia Rizhan, ST 19771025 200701 1 009	Kasi Pemanf., Pengend. Dan Evaluasi Tata Ruang	S1	Penata Tk. I	III/d	46
20	Fathurrahmani, ST 19710929 200604 1 006	Kasi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	S1	Penata Tk. I	III/d	52
21	Iwan Noviantara, ST 19781123 201001 1 001	Kasi Peralatan dan Uji Mutu	S1	Penata	III/c	45
22	Nindika Kusyaning Rekandalu, SE 19880228 201001 2 013	Penyusun Rencana Kebutuhan	S1	Penata Muda Tk. I	III/b	35
23	Yuni Rosyada, A.md 19800621 201001 2 013	Fungsional Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan/Mahir	D-III	Penata Muda	III/a	43
24	Miftahuddin, S.E 19881216 202203 1 001	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	S1	Penata Muda	III/a	35
25	Hetti Sari, S.E 19940513 202203 2 006	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	S1	Penata Muda	III/a	29
26	Nissha Hardyan Sari, ST 19871211 202203 2 003	Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S1	Penata Muda	III/a	36
27	Wahyu Ag Saputra, S.M. 19971029 202203 1 003	Ahli Pertama Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	S1	Penata Muda	III/a	26
28	Kristina Endang S.,SE 19780622 201001 2 006	Bendahara	S1	Penata Tk. I	III/d	45

No.	Nama / NIP / NIPPPK / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
29	H.M. Nursolichi 19691225 199103 1 008	Pengelola Gaji	SLTA	Penata Muda Tk. I	III/b	54
30	Dhermawan 19720417 200701 1 017	Pengadministrasian Keuangan	SLTA	Pengatur Tk. I	II/d	51
31	Fitriyani 19770914 201212 2 002	Pengadministrasian Keuangan	SLTA	Pengatur	II/c	46
32	Isalah Salsabilla Salman, A.Md.Ak 19990807 202203 2 005	Verifikator Keuangan	D-III	Pengatur	II/c	24
33	Aulia Mulyani, ST 19780222 200801 2 021	Analisis Sumber Daya Air	S1	Penata Tk. I	III/d	45
34	Ramayanti, S. Ars 19901108 202012 2 004	Fungsional Ahli Pertama Teknik Pengairan	S1	Penata Muda	III/a	33
35	Rizal Fitriannor, S.T 19940315 202203 1 009	Analisis Sumber Daya Air	S1	Penata Muda	III/a	29
36	Reza Lazuardi Hafidz, S.T 19980722 202203 1 005	Analisis Sumber Daya Air	S1	Penata Muda	III/a	25
37	Diana Pratiwi, S. Ars 19930309 202012 2 005	Fungsional Ahli Pertama Teknik Pengairan	S1	Penata Muda	III/a	30
38	Ahmad Rivani, A.Md.T 19991202 202203 1 003	Terampil Teknik Pengairan	D-III	Pengatur	II/c	24
39	Yusuf Khoiruddin, M.T. 19740722 200903 1 001	Analisis Jalan Jembatan	S2	Pembina	IV/a	49
40	Andhika Yusuf Prabowo, S.Ars 19961122 202012 1 002	Fungsional Ahli Pertama Teknik Jalan dan Jembatan	S1	Penata Muda	III/a	27
41	Elma Sadina, A.Md.T 20000330 202203 2 001	Terampil Teknik Jalan dan Jembatan	D-III	Pengatur	II/c	23
42	Novia Tinna Wijayanti, ST 19861109 202012 2 002	Fungsional Ahli Pertama Teknik Jalan dan Jembatan	S1	Penata Muda	III/a	37
43	M. Rusydi Romadhon, S.T 19950219 202203 1 004	Pengawas Jalan dan Jembatan	S1	Penata Muda	III/a	28
44	Irpansyah, SST 19760708 199803 1 004	Analisis Pengembangan Sarana Prasarana	D-IV	Penata Tk.I	III/d	47
45	Irwansyah Isnaini Muharam, ST 19801110 200904 1 002	Pengawas Bangunan dan Gedung	S1	Penata Tk. I	III/d	43

No.	Nama / NIP / NIPPPK / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
46	Heny Henderawati, ST 19770110 200701 2 020	Pengawas Jaringan Utilitas	S1	Penata	III/c	46
47	M. Irhash Maulana, S.Ars 19970318 202012 1 004	Fungsional Ahli Pertama Teknik Lingkungan	S1	Penata Muda	III/a	26
48	Amalia Maulida, A.Md.Ars 19980625 202203 2 009	Terampil Tehnik Penyehatan Lingkungan	D-III	Pengatur	II/c	25
49	Raihan 19811108 20101 1 004	Pemelihara Sarana dan Prasarana	SLTA	Pengatur Tingkat I	II/d	42
50	Mirza Cahyadi, ST 19791223 200701 1 006	Analisis Tata Ruang	S1	Penata Tk. I	III/d	44
51	Laila Hanif, A.Md 19830416 201406 2 003	Pengelola Geoaspal	D-III	Pengatur Tk. I	II/d	40
52	Marisa Arini, A.Md 19970307 202203 2 010	Pengelola Dokumen Perizinan	D-III	Pengatur	II/c	26
53	Dedi Hidayat, A.Md 19851222 201101 1 009	Operator Alat Berat	D-III	Penata Muda Tk. I	III/b	38
54	Sukirman 19660727 201212 1 001	Operator Alat Berat	SLTA	Pengatur	II/c	57
55	Novita Sari, S.T 19960908 202203 2 014	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	S1	Penata Muda	III/a	27
56	Maria Prisila Hederanti Itu, S.T 19990711 202203 2 005	Penguji Laboratorium Tanah, Aspal dan Beton	S1	Penata Muda	III/a	24
57	Evie Noviannor, ST 19771117 202321 2 006	Ahli Pertama – Penata Ruang	S1	-	IX	46
58	Selamat Heru Widodo, ST 19801111 202321 1 005	Ahli Pertama - Pembina Jasa Konstruksi	S1	-	IX	43
59	Ahlia, Amd 19741212 202321 2 012	Terampil – Pranata Komputer	D-III	-	VII	49
60	Hendra Mianata, A.Md 19811210 202321 1 007	Terampil – Teknik Pengairan	D-III	-	VII	42

No.	Nama / NIP / NIPPPK / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
61	Linda Ariani 050 85 08	Pengelola Administrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian	S1	-	-	38
62	Diyaul Lubaba 05.00.21.13	Administrasi Persuratan pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SLTA	-	-	23
63	M. Rifqi Arrahimi 05.03.22.19	Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SLTA	-	-	20
64	Nur Azmia 05.04.22.30	Pengadministrasi Umum pada Subbag Umum dan Kepegawaian	SLTA	-	-	19
65	Jaya Raya, Amd 05.74.22.20	Pemelihara Sarana dan Sarana Kantor pada Subbag Umum dan Kepegawaian	D-III	-	-	49
66	Tasya Rizkita Amalinda, S.Ars 05.92.18.02	Pengelola Bahan Perencanaan pada Subbag Perencanaan	S1	-	-	31
67	Moechammad Ferry Noviyandi, S.Kom 05.94.22.17	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Subbag Perencanaan	S1	-	-	29
68	Gusti M.Fakhruriza Rakhman, A.Md 15.94.18.03	Staff Administrasi Subbag Keuangan	D-III	-	-	29
69	Akhmad Riza Ramadhan, A.md 007 88 10	Pelaksana pada Bidang Sumber Daya Alr	D-III	-	-	35
70	Muhammad Rizkian Noor, ST 05.92.21.10	Pelaksana pada Bidang Sumber Daya Alr	S1	-	-	31
71	Husna Nadhira Awfiyaa, ST 05. 92. 21.14	Pengadministrasi Teknis Irigasi dan Rawa pada Bidang Sumber Daya Alr	S1	-	-	25
72	Eddy Rusmadi, ST 839 058 104	Pelaksana pada Bidang Bina Marga	S1	-	-	32
73	Fanny Yudhadinata,ST 157 81 08	Pelaksana pada Bidang Bina Marga	S1	-	-	42
74	Noorlianty,ST 256 77 09	Pelaksana pada Bidang Bina Marga	S1	-	-	46
75	Linda Nuvita Rini,ST 136 84 10	Pelaksana pada Bidang Bina Marga	S1	-	-	39

No.	Nama / NIP / NIPPPK / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
76	Ana Noviana, ST 15.87.19.04	Pelaksana pada Bidang Bina Marga	S1	-	-	36
77	Fitria Nur Sarie, ST 824 058 104	Pelaksana pada Bidang Cipta Karya	S1	-	-	42
78	Yenny Marlina, ST 053 84 08	Pengadministrasi Umum pada Bidang Cipta Karya	S1	-	-	39
79	M. Taufik Amrullah, ST 101 81 08	Pelaksana Teknis Tata Bangunan dan Gedung pada Bidang Cipta Karya	S1	-	-	42
80	Fauzi Alvi, S. Ars 05.93.19.05	Pelaksana Teknis Tata Bangunan dan Gedung pada Bidang Cipta Karya	S1	-	-	30
81	Rissa Saftiranti, SKM 05..88.19.06	Pengadministrasi Umum pada Bidang Cipta Karya	S1	-	-	35
82	Melda Sari, SKM 05.97.22.21	Pengadministrasi Umum pada Bidang Cipta Karya	S1	-	-	26
83	Syarifah Silvira Faridha 05.97.22.22	Tenaga Administasi pada Bidang Cipta Karya	SLTA	-	-	26
84	Aulia Rahmah 05.96.22.23	Tenaga Operator Call Center Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Bidang Cipta Karya	S1	-	-	27
85	Muhammad Rizki Ramadhoni 05.95.22.24	Pengawas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Bidang Cipta Karya	SLTA	-	-	28
86	Nopa Hermawanto, S.Kom 05.84.22.24	Pengawas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Bidang Cipta Karya	S1	-	-	38
87	Rafika Arie 05.80.22.26	Tenaga Administasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Bidang Cipta Karya	S1	-	-	43
88	Anita Marianti, SP 05.81.22.27	Tenaga Administasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Bidang Cipta Karya	S1	-	-	42
89	Hidayat Effendi	Pekerja Tipe 1 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Bidang Cipta Karya	SLTA	-	-	46
90	Didik Heru Utomo	Pembantu Sopir Mobil Truck Tinja Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Bidang Cipta Karya	SLTA	-	-	56
91	Muhammad Hasbi	Pekerja Tipe 2 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Bidang Cipta Karya	SLTA	-	-	47

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
92	Alghipari	Pekerja Tipe 2 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Bidang Cipta Karya	SLTA	-	-	18
93	Sobhan Fahrian	Pekerja Tipe 1 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Bidang Cipta Karya	SLTA	-	-	45
94	Hidayat Rahmatullah	Sopir Mobil Truck Tinja Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Bidang Cipta Karya	SLTA	-	-	46
95	Muhammad Maulana	Sopir Mobil Truck Tinja Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja pada Bidang Cipta Karya	SLTA	-	-	30
96	Ustien Anaina Maria, SE, MT 420 76 09	Pengelola Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang	S2			47
97	Annajah 078 87 09	Pengadministrasi Umum pada Bidang Tata Ruang	SLTA			36
98	M. Farkhan Abidillah, S.PWK 005.92.19	Analisis Pemanfaatan Ruang pada Bidang Tata Ruang	S1			31
99	M. Naufal Firdaus 05.01.19.07	Pengadministrasi Umum pada Bidang Tata Ruang	SLTA			22
100	Habib Abdillah, S.Si. 05.00.23.34	Analisis Perencanaan pada Bidang Tata Ruang	S1			23
101	Risa Wisdayanti, SE 113 84 08	Tenaga Administrasi pada Bidang Pengembangan Konstruksi	S1			39
102	Ramadhani Taufiqurrahman 274 84 09	Operator Alat Berat pada Bidang Pengembangan Konstruksi	SLTA			39
103	Danar Jovian Aji Ogantara, Amd 05.96.22.18	Pengelola Kegiatan pada Bidang Pengembangan Konstruksi	D-III			27
104	Misdi 05. 76. 22. 28	Petugas Keamanan (Jaga Malam)				47
105	Sutikno	Petugas Kebersihan Halaman Kantor				62

No.	Nama / NIP / NRPTT / NRTK	Jabatan	Pendidikan	Pangkat	Gol.	Usia
1	2	3	4	5	6	7
106	A. Darmawi	Pengemudi				61
107	Shinta Prasasti Dwi	Cleaning Service				29
108	Silvia	Cleaning Service				44
109	Muhammad Abdul Karim	Petugas Kebersihan Halaman Kantor				32
110	Fitriyani	Petugas Kebersihan Halaman Kantor				31

BAB II
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru mengacu pada Misi Kota Banjarbaru yang tercantum dalam RPJMD Kota Banjarbaru, yaitu :

- Misi I : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Sejahtera dan Berakhlak Mulia.
- Misi II : Meningkatkan Pembangunan Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dengan Kearifan Lokal dan Tetap Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup.
- Misi III : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah.

1. Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari misi SKPD, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan. Penentuan tujuan dimaksudkan sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berikut adalah tujuan yang akan dicapai yaitu :

- a. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah.
- b. Menurunkan Angka Stunting.
- c. Meningkatkan Ketersediaan Pangan Masyarakat.
- d. Meningkatkan Infrastruktur Kota yang Berkualitas.

2. Sasaran

Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Dalam hal ini sasaran yang ingin dicapai adalah Jangka Menengah (5 tahun) kedepan.

Berdasarkan uraian diatas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru menetapkan beberapa sasaran yang relevan dengan Visi dan Misi tersebut diatas sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- b. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air.
- c. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
- d. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
- e. Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase.
- f. Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung.
- g. Meningkatkan Penyelenggaraan Jalan.
- h. Meningkatkan Pengembangan Jasa Konstruksi.
- i. Meningkatkan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Strategi

Untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diperlukan strategi. Strategi disusun dengan mengacu tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Adapun strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. *Bidang Bina Marga.*
 - Meningkatkan Tingkat Kemantapan Jalan Kota dan Bangunan Pelengkap Jalan.
 - Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah di Kota Banjarbaru.
 - Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota Yang Berkualitas.

b. *Bidang Cipta Karya.*

- Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik.
- Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Lingkungan Yang Berkualitas.
- Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman Yang Baik dan Merata.
- Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik.
- Meningkatkan Penataan Bangunan Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik.

c. *Bidang Sumber Daya Air*

- Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air.

d. *Bidang Pembinaan Konstruksi*

- Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi.

e. *Bidang Tata Ruang*

- Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota Yang Konsisten.

2. Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani SKPD, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra SKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru, menetapkan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuannya, yaitu dengan :

- a. Melakukan pembebasan lahan melalui partisipasi masyarakat dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat melalui penyuluhan, sosialisasi program-program pembangunan
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Dinas / Instansi terkait dalam pelaksanaan Program Pembangunan Daerah.
- c. Meningkatkan jalan kota dalam kondisi baik dan sedang.

- d. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan jalan, jembatan dan drainase yang berwawasan lingkungan.
- e. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi.
- f. Meningkatkan Kerjasama dan penyertaan modal dalam pipanisasi.
- g. Meningkatkan akses air minum yang aman dan sanitasi yang bersih dan sehat tanpa mengesampingkan kelestarian sumber daya alam dan keserasian lingkungan hidup.
- h. Mempertahankan & mengoptimalkan pemberdayaan bangunan irigasi yang telah terbangun.
- i. Mengadakan Sosialisasi Peraturan Per-Undang-undangan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- j. Meningkatkan pembinaan, bimbingan teknis bidang konstruksi.
- k. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan provinsi serta kab/kota dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- l. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik dan pemerintahan yang merata, aman, dan bewawasan lingkungan.
- m. Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang tata ruang.
- n. Penyusunan rencana tata ruang beserta revisinya.
- o. Penyelenggaraan pengawasan, pembinaan serta pengendalian pemanfaatan ruang.

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Renstra Tahun 2021-2026 dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2023, terdiri dari :

- * 10 (sepuluh) Program;
- * 21 (dua puluh satu) Kegiatan; dan
- * 56 (lima puluh enam) Sub Kegiatan

Dari 10 (sepuluh) Program, 21 (dua puluh satu) Kegiatan dan 56 (lima puluh enam) Sub Kegiatan tersebut apabila dijelaskan lebih rinci menjadi sebagai berikut :

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.**
 - 1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.**
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - 1) Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 5) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 6) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1) Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 3) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - 1) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opearsional atau Lapangan
 - 3) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 6) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)**
- a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Tanggul Sungai
 - 3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai
 - b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**

- 1) Sub Kegiatan Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan
- 2) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan
- 3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan
- 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum**
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota.**
 - 1) Sub Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan
- 4. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah**
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota
 - 2) Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
- 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase**
 - a. Kegiatan Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
 - 2) Sub Kegiatan Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan
 - 3) Sub Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase
 - 4) Sub Kegiatan Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan
 - 5) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan
- 6. Program Pengembangan Pemukiman**
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota
- 7. Program Penataan Bangunan Gedung**
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**

- 1) Sub Kegiatan Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota
- 8. Program Penyelenggaraan Jalan**
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Pembangunan Jalan
 - 2) Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan
 - 3) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jalan
 - 4) Sub Kegiatan Pemeliharaan Berkala Jalan
 - 5) Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Jalan
 - 6) Sub Kegiatan Pembangunan Jembatan
 - 7) Sub Kegiatan Rehabilitasi Jembatan
- 9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi**
 - a. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
 - 2) Sub Kegiatan Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi
 - b. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**
 - 1) Sub Kegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- 10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**
 - a. Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota
 - 2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota
 - 3) Sub Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang
 - b. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**
 - 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah

c. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Tabel. 4
Rencana Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2023)	
				Target	
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akutabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Predikat akuntabilitas kinerja perangkat daerah	BB	SEKRETARIAT
	Meningkatnya Pelayanan Internal Perangkat Daerah		Cakupan pelayanan internal yang difasilitasi	100%	
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, dan laporan evaluasi kinerja SKPD	100%	
	Meningkatnya nilai AKIP SKPD	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	
	Meningkatnya pelayanan dan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang	100%	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2023)	
				Target	
	akuntabilitas kinerja		disusun sesuai ketentuan		SEKRETARIAT
	Meningkatnya penatausahaan perencanaan dan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	59 Orang	
	Meningkatnya penatausahaan perencanaan dan keuangan sesuai dengan perundang-undangan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	100%	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	250 Buah	
	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum yang difasilitasi	Baik	
	Meningkatnya penatausahaan kepegawaian	Penyediaan Peralatan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6 Paket	
		Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	7 Paket	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2023)	
				Target	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	12 Dokumen	SEKRETARIAT
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	130 Laporan	
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Paket	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dapat digunakan	100%	
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	25 buah	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	32 Unit	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	13 Unit	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah yang difasilitasi	100%	
	Meningkatnya pelayanan sarana	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	12 Laporan	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2023)	
				Target	
	dan prasarana aparatur		Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan		SEKRETARIAT
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	
	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Barang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dalam kondisi baik	100%	
	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana aparatur	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 Unit	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	20 Unit	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang dipelihara dan dibayarkan perizinannya	4 unit	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	3 Paket	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor /Bangunan Lainnya yang dipelihara	1 Paket	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Paket	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2023)	
				Target	
Meningkat Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan banjir	44,17%	SUMBER DAYA AIR
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat			Persentase luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	74,61%	
	Berkurangnya permasalahan rawan banjir	Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase infrastruktur perlindungan banjir yang terbangun	44,17%	
	Panjang Tebing dan tanggul Sungai yang ditingkatkan dengan pemasangan siring dinding penahan tanah dan urugan tanah, panjang sungai yang ditingkatkan kapasitasnya dengan normalisasi, serta Infrastruktur pengendali banjir	Peningkatan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang ditingkatkan	844 m	
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang dipelihara	6.129 m	
		Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Jumlah Embung yang Dibangun	1 Buah	
	Meningkatnya Kinerja Sistem Irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	74,61%	
	Infrastruktur Irigasi dalam Keadaan Baik	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang ditingkatkan	0,335 Km	
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang direhabilitasi	0,3717 Km	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang dioperasikan dan dipelihara	14,85 Km	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2023)	
				Target	
Menurunnya Angka Stunting	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	98,85%	CIPTA KARYA
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	98,85%	
	Meningkatnya jumlah KK yang mendapatkan akses air minum yang aman	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah penambahan sambungan rumah yang terlayani melalui Pemanfaatan Idle Capacity dengan penambahan jaringan perpipaan pada SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu	744 SR	
Menurunnya Angka Stunting	Meningkatkan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik di kota	100%	
	Meningkatnya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	100%	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2023)	
				Target	
	Meningkatnya jumlah KK yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Rehabilitasi/ Peningkatan/ Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah Penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	75 RT	CIPTA KARYA
	Meningkatnya jumlah KK yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Pembangunan/ Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah rumah tangga yang memiliki tangki septik	270 RT	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Infrastruktur Saluran Drainase Jalan Kota dan Lingkungan yang Berkualitas	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik	61,41%	BINA MARGA dan CIPTA KARYA
	Meningkatnya infrastruktur saluran drainase jalan kota yang berkualitas	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saluran drainase jalan kota yang berfungsi baik	53.35%	BINA MARGA
	Meningkatnya sistem jaringan Drainase lingkungan dalam kondisi baik		Persentase saluran drainase jalan lingkungan yang berfungsi dengan baik	69.46%	CIPTA KARYA
	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase jalan kota	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang dibangun	3.983 m	BINA MARGA
		Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan	Panjang saluran drainase perkotaan yang ditingkatkan	600 m	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Panjang saluran drainase yang dioperasikan dan dipelihara	1.352 m	
	Terlaksananya pembangunan dan pemeliharaan drainase lingkungan	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	Panjang saluran drainase lingkungan yang dilakukan rehabilitasi	1.352 m	CIPTA KARYA
		Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana sistem drainase lingkungan yang disediakan	7 Unit	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2023)	
				Target	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis.	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase infrastruktur jalan lingkungan kawasan permukiman di kawasan strategis kota dalam kondisi baik	88,56%	CIPTA KARYA
	Meningkatnya Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tingkat Kondisi Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	88,56%	
	Meningkatnya panjang Jalan Lingkungan yang Baik dan Sedang	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman yang Dibangun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	122 Sistem Jaringan	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Penataan Bangunan Gedung Negara Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase gedung negara milik pemerintah daerah dalam kondisi baik	100%	
	Meningkatnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100%	
	Meningkatnya jumlah gedung kantor dan sarana publik dalam kondisi baik	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen	
		Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan dan Perawatan	7 Unit	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2023)	
				Target	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Penataan Bangunan Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang tertata baik	100%	CIPTA KARYA
	Meningkatnya Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Aparatur dan Sarana Publik dalam Kondisi Baik	100%	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan kota	81,33%	BINA MARGA
	Meningkatnya tingkat kemantapan jalan kota dan bangunan pelengkap jalan Meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kota Banjarbaru	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan kota dalam kondisi baik dan sedang	82,61%	
			Persentase jalan kota yang terbangun	7,80%	
	Terlaksananya pembangunan jalan kota	Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang dibangun	1.176 m	
	Terlaksananya rekonstruksi jalan kota	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	8.526 m	
	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan kota	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi	4.511 m	
		Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	4.032 m	
		Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	2.722 m	
	Terlaksananya pembangunan jalan kota	Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	0 m	
	Terlaksananya rehabilitasi/ pemeliharaan jalan kota	Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi	14 m	

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2023)	
				Target	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Layanan Informasi dan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	PENGEMBANGAN KONSTRUKSI
	Meningkatnya ketersediaan informasi Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan yang sesuai dengan bobot layanan jenis informasi jasa konstruksi menurut SPM PU	100%	
	Terwujudnya ketersediaan informasi jasa konstruksi yang ditetapkan dalam SPM PU	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi	7 Laporan	
		Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi	30 Dokumen	
	Meningkatnya paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Prosentase paket pekerjaan yang dilakukan pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	100%	
	Terlaksananya pengawasan terhadap tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Dokumen Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	30 Laporan	
Meningkatnya Infrastruktur Kota yang Berkualitas	Meningkatkan Tertib Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota yang Konsisten.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase terselenggara nya penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	78,00%	TATA RUANG

Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan	Unit Kerja DPUPR Penanggung Jawab
				Tahun 1 (2023)	
				Target	
	Meningkatnya tertib perencanaan tata ruang kota	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kab/Kota	Persentase penyusunan Rencana Tata Ruang dan Rencana Rinci Tata Ruang	45%	TATA RUANG
	Tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	
	Tersusunnya dokumen teknis rencana Tata Ruang (RTR)	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRR Kabupaten/Kota	3 Dokumen	
	Tersedianya dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	1 Dokumen	
	Meningkatnya tertib pemanfaatan ruang kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	100%	
	Terselesaikan nya perizinan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT) dari pemohon izin	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1 Dokumen	
	Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penertiban pemanfaatan ruang	100%	
	Bertambahnya lokasi perizinan yang sesuai dengan perizinan dan peruntukan ruangnya	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	50 Dokumen	

BAB III
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.
INDIKATOR KINERJA KUNCI KELUARAN

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)		48,76 Ha
2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)		90,922 m
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Tidak Ada
4		Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Tidak Ada

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
5	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota		Ada
6		Rencana Teknis Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Ada
7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota		60.163 m
1	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)		48,76 Ha
2		Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kota (m)		90,922 m
3		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Tidak Ada
4		Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)		Tidak Ada

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian	
5	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota		Ada	
6		Rencana Teknis Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota		Ada	
7		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota		60.163 m	
1	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan Irigasi	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Primer dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Primer (m)}} \times 100 \%$	$\frac{17.963}{25.300} \times 100\%$	71,00%
2		Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Sekunder dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Sekunder (m)}} \times 100 \%$	$\frac{73.468}{134.381} \times 100\%$	54,67%
3		Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang Jaringan Irigasi Tersier dalam Kondisi Baik (m)}}{\text{Panjang Jaringan Irigasi Tersier (m)}} \times 100 \%$	$\frac{43.785}{60.824} \times 100\%$	71,99%
1	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan	Pemenuhan dokumen RISPAM kota		Ada	
2		Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kota		Tidak Ada	

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
3	perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota penyelenggaran SPAM		1 Perusahaan
4		Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Tidak Ada
5		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain		Tidak Ada
1	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		56.815 rumah
2		Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD T		9.577 rumah
3		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		66.392 rumah

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian	
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		52 rumah	
5		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		52 rumah	
6		Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		9.577 rumah	
7		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk/tangki septik}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 jiwa/ha}} \times 100 \%$	$\frac{56.815}{65.392} \times 100\%$	85,58 %
8		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun >25 jiwa/ha}} \times 100 \%$	$\frac{9.577}{65.392} \times 100\%$	14,42 %
9		Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah di wilayah pengembangan SPALDT}} \times 100 \%$	$\frac{9.577}{65.392} \times 100\%$	14,42 %
10		Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$	$\frac{56.815}{65.392} \times 100\%$	85,58 %

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian	
11	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kota}} \times 100\%$	$\frac{3 \text{ buah}}{3 \text{ buah}} \times 100\%$	100%
12		Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia}}{\sum \text{jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kota}} \times 100\%$	$\frac{20 \text{ m}^3}{100 \text{ m}^3} \times 100\%$	20 %
13		Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD}}{\sum \text{jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kota}} \times 100\%$	$\frac{9.577}{66.392} \times 100\%$	14,42 %
14		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S}} \times 100\%$	$\frac{52}{66.392} \times 100\%$	0,08 %
1	Rasio Kepatuhan PBG Kota	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	$\frac{\sum \text{jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku}}{\sum \text{jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana}} \times 100 \%$	$\frac{7}{197} \times 100\% = 0,04\%$	
2		Jumlah PBG yang diberikan oleh Pemerintah Kota dalam tahun eksisting		387 buah	
3		Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	Ada	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Bangunan Gedung	

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
4	Rasio Kepatuhan PBG Kota	Penetapan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	Ada	Yang ada hanya untuk SK TPA Bangunan Gedung (SK Wali Kota Nomor : 188.45/105/KUM/2023, tanggal 6 Maret 2023 Tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kota Banjarbaru) Adanya Penambahan Anggota Tim sehingga dikeluarkan kembali SK Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/405/KUM/2023 tanggal 30 Oktober 2023 Tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung Kota Banjarbaru
5		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Tidak Ada
6		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi		Tidak Ada
7		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kota		62 Buah
8		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat		62 Buah

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK Jalan kewenangan Kota		1.123,434 Km
2		Panjang jalan yang dibangun		473 m
3		Panjang jembatan yang dibangun		0 m
4		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)		1.020,105 m
5		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		0 m
6		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		3.163 m
7		Panjang jembatan yang direhabilitasi		14 m
8		Panjang jalan yang dipelihara		2.722 m
9		Panjang jembatan yang dipelihara		1 Buah
1	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		1 Kali Pelatihan/Sosialisasi
2		Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota		25 orang
3		Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		39 orang

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
4	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir		Ada
5		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota		Ada
6		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN		Tidak Ada
7		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya		Tidak Ada
8		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada
9		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kota		Ada
10		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di		Ada

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	wilayah kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		
11		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada
12		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota		Ada
13		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kab/kota		Ada
14		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Tidak Ada

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
15	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada
16		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak Ada
17		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada
18		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kota		Tidak Ada
19		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kota		Tidak Ada
20		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kota		Ada

No.	IKK OUTCOME	IKK OUTPUT	RUMUS	Capaian
21	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota		Ada
22		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Tidak Ada
23		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		86 Perusahaan
24		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Tidak Ada
25		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		86 Perusahaan
1	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		$\frac{\text{Jumlah Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah Total Proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya}} \times 100\%$	0%

2. Indikator Kinerja Kunci Hasil

Pencapaian Indikator Kinerja Kunci Hasil dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.
INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
1.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	$\frac{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kota (ha)}}{\text{Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kota (ha)}} \times 100\%$	$\frac{29,37 \text{ ha}}{48,76 \text{ ha}} \times 100\%$	60,23 %
	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)				
	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)				
	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)				
	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Rencana Teknis Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota				
	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota				
2.	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	$\frac{\text{Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)}}{\text{Luas Kawasan Permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kab/Kota (Ha)}} \times 100\%$	$\frac{0}{0} \times 100\%$	0,00%
	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (m)				
	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota			
	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD Air WS Kewenangan kabupaten/kota				
	Rencana Teknis Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota				
	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kota				
3.	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan Irigasi	$\frac{\text{Luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha)}}{\text{Luas daerah irigasi kewenangan kota}} \times 100\%$	$\frac{2.021,5 \text{ Ha}}{5.700 \text{ Ha}} \times 100\%$	35,46 %
	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik				
	Persentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
4.	Pemenuhan dokumen RISPAM kota	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota	$\frac{\text{Jumlah komulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota}}{\text{Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota tersebut}} \times 100\%$	$\frac{14.561 + 51.831}{66.392} \times 100 \%$	100 %
	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kota				
	Jumlah BUMD dan atau UPTD kota penyelenggaran SPAM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kota			
	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM				
	Jumlah kerja sama penyelenggaran SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain				
5.	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	$\frac{\text{Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\text{Jumlah rumah di kota}} \times 100\%$	$\frac{56.815 + 9.577}{66.392} \times 100\%$	100%
	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD T				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD- T	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik			
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja				
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja				
	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik				
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses dasar				
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-S akses aman				
	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD-T akses aman				
	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja				
	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja				
	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD				
	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja				
6.	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Rasio Kepatuhan PBG Kota	$\frac{\text{Jumlah pemanfaatan persetujuan bangunan gedung yang sesuai peruntukannya}}{\text{Jumlah persetujuan bangunan gedung yang berlaku}} \times 100\%$	$\frac{387}{387} \times 100\% = 100\%$	100%
	Jumlah PBG yang diberikan oleh Pemerintah Kota dalam tahun eksisting				
	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung				
	Penetapan Keputusan Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung				
	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi				
	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kota				
	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kota yang dipelihara/dirawat				
7.	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan Kepala Daerah dalam SK jalan kewenangan Kota	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	$\frac{\text{Panjang jalan kewenangan kota yang mantap}}{\text{Panjang jalan keseluruhan di wilayah kota}} \times 100\%$	$\frac{(477,424 + 547,050) \text{ Km}}{(555,275 + 568,159) \text{ Km}} \times 100\%$	91,19 %
	Panjang jalan yang dibangun				
	Panjang jembatan yang dibangun				
	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)				
	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi				
	Panjang jembatan yang direhabilitasi				
	Panjang jalan yang dipelihara				
	Panjang jembatan yang dipelihara				
8.	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kota	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Kota yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Operator dan Teknis/Analisis}}{\text{Jumlah Kebutuhan Tenaga Operator dan Teknis/Analisis di wilayah kota}} \times 100\%$	$\frac{39 \text{ orang}}{280 \text{ orang}} \times 100\%$	13,92 %
	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kota				
	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kota				
	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kota	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi			
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN				
	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya				
	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala				
	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kota				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian
	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.			
	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis			Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Salah satu poin yang dikoreksi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Adalah perubahan terkait prosedur Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang dihapuskan atau sebelumnya telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi dan peraturan tentang jasa konstruksi lainnya sejak tanggal 30 Juli 2021.

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kota	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi			
	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota				
	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui				
	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Rasio Tenaga Operator/Teknisi/Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi			
	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kota				
	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kota				
	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kota				
	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kota				
	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui				
	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha				

No.	IKK OUTPUT	IKK OUTCOME	RUMUS	Capaian	
	jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya				
	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya				
9.		Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	$\frac{\text{Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi}}{\text{Jumlah total proyek yang menjadi kewenangannya pengawasannya}} \times 100\%$	0%	

BAB IV
TUGAS PEMBANTUAN

----- Nihil -----

BAB V

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. JENIS PELAYANAN DASAR

Pada Tahun 2021, mengalami perubahan regulasi tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yaitu Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, memuat tentang mekanisme dan strategi penerapan SPM mulai dari pengumpulan data, penghitungan, pemenuhan kebutuhan dasar, perencanaan SPM dan pelaksanaan SPM serta pelaporan.

Petunjuk Teknis melalui Permen PUPR 13/2023 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (perubahan atas Permen PUPR 29/2018) memuat tentang jenis pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum (Sanitasi dan Air Minum).

Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menerapkan SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu **pelayanan dasar** yang merupakan **urusan pemerintahan wajib** yang berhak **diperoleh setiap warga negara secara minimal**. Jenis Pelayanan dasar untuk Kabupaten/Kota Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6
Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Tahun 2023

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Nasional Tahun 2023
I.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%
II.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah Domestik	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%

Berdasarkan Permen PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (perubahan atas Permen PUPR 29/2018) memuat tentang jenis pelayanan dasar bidang Pekerjaan Umum (Sanitasi dan Air Minum) yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Tahun 2023 ada dua Indikator dari target Nasional, yaitu :

1

Jenis Pelayanan Dasar :

Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari

No	Indikator		Realisasi Pencapaian Semester I Tahun 2023	Realisasi Pencapaian Semester II Tahun 2023	Target Nasional s/d Tahun 2023
I.	1.	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	98,90 %	100 %	100%

2

Jenis Pelayanan Dasar :

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

No	Indikator		Realisasi Pencapaian Semester I Tahun 2023	Realisasi Pencapaian Semester II Tahun 2023	Target Nasional s/d Tahun 2023
I.	1.	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %	100 %	100 %

B. ALOKASI ANGGARAN

Adapun rencana anggaran untuk tahun 2023 dalam melaksanakan kegiatan ini sebesar **Rp. 19.835.973.000,-**. Data dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel. 7
Alokasi Rencana Anggaran
Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023

No	Indikator		Program	Perhitungan Rencana Biaya Tahun 2023
I	1	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	8.318.711.000,-
	2	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap layanan pengolahan air limbah domestik Kota	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	11.517.262.000,-

C. DUKUNGAN PERSONIL

Dukungan personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sampai Tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) orang terdiri dari :

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	:	6	Orang
Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak	:	2	Orang
Dengan Posisi / Jabatan sebagai berikut			
Kepala Dinas (ess. II b)	:	1	Orang
Sekretaris (ess. III a)	:	1	Orang

Kepala Bidang (ess. III b)	:	1	Orang
Kasubag/Kasi (ess. IV a)	:	1	Orang
Staf PNS/PTT/Tenaga Kontrak	:	4	Orang

D. PERMASALAHAN SOLUSI

SPM Bidang Air Minum telah mencapai target yaitu dari 5 kecamatan yang ada di Kota Banjarbaru tercapai 78,07% (51.831 KK) yang memperoleh akses air minum aman, atau dalam hal ini mereka adalah masyarakat yang terlayani oleh jaringan pipa PDAM. Akses air minum aman (*safely managed*) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan amanat *Sustainable Development Goals* (SDG) adalah rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak, lokasi sumber air berada di dalam atau di luar rumah (*on-premises*), tersedia setiap saat dibutuhkan dan kualitas air minum yang dipergunakan memenuhi syarat kualitas air minum yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum.

Berdasarkan data BPS, 21,93% (14.561 KK) dari total jumlah KK yang tersebar di 5 kecamatan dilayani oleh akses air minum berupa akses layak terbatas dan akses layak dasar.

Akses layak terbatas (*limited access*) adalah kualitas air minum yang belum diketahui memenuhi syarat Kesehatan atau tidak. Syarat itu di antaranya adalah sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung dan air hujan, dengan waktu tempuh dari sumber air minum ke rumah > atau sama dengan 30 menit (termasuk waktu antri).

Sedangkan akses layak dasar adalah (*basic access*) adalah adalah kualitas air minum yang belum diketahui memenuhi syarat Kesehatan atau tidak. Syarat itu di antaranya adalah sumber air minum berasal dari perpipaan, kran umum, sumur bor/pompa, mata air terlindung dan air hujan, dengan waktu tempuh dari sumber air minum ke rumah < atau sama dengan 30 menit (termasuk waktu antri).

Total capaian SPM (Layak + Aman) Bidang Air Minum sampai dengan semester II Tahun 2023 adalah sebesar 100%, Berdasarkan data BPS, masyarakat ini menggunakan mata air tak terlindung dan air permukaan seperti sungai, kolam, danau/waduk dan irigasi.

Adapun total persentase jumlah KK yang harus terlayani akses air minum aman sampai tahun 2024 adalah sebesar 100% dari 5 kecamatan, yang terdiri dari 51.831 KK akses aman dan 14.561 KK akses layak, dengan target prosentase terbesar berada di Kecamatan Landasan Ulin sebesar 30,53%.

Total Target SPM Bidang Air Minum sampai dengan tahun 2024 adalah Akses Layak 100% termasuk Akses Aman 15% merupakan target yang harus dicapai oleh Kota Banjarbaru, berdasarkan *Memorandum of Understanding* (MoU) Pencapaian Target SPM yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru dan Ketua Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 yang lalu.

Salah satu kendala dalam pencapaian target akses air minum 100% adalah tidak semua masyarakat Kota Banjarbaru bersedia untuk berlangganan jaringan PDAM, dimana jaringan PDAM adalah merupakan salah satu akses aman terhadap air minum. Beberapa penyebabnya antara lain masih kurang tercemarnya air sumur dangkal yang digunakan sebagai air minum, selain itu air tanah cenderung lebih mudah didapatkan melalui sumur gali dan pada saat musim kering, tidak semua sumur gali mengalami kekeringan, sehingga jaringan PDAM hanya dijadikan opsi cadangan dalam memperoleh air minum.

Di beberapa tempat seperti di Kecamatan Cempaka, sebagaimana berdasarkan data sebaran Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) banyak terdapat di 4 kelurahan pada Kecamatan dimaksud yang mengakibatkan kecenderungan masyarakat untuk menggunakan sumur gali sebagai sumber air minum utama dan kegiatan sehari-hari adalah lebih kepada faktor ketidakmampuan mereka untuk membayar biaya berlangganan PDAM setiap bulannya, ini Padahal air sumur yang digunakan cukup tercemar, dalam hal ini pada musim kering, air cukup keruh dan berbau.

Oleh karenanya, agar akses air minum aman dapat tercapai 100% pada tahun 2024 mendatang, salah satu solusinya adalah melalui pencapaian akses air minum aman baik dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat maupun penyediaan akses air minum aman berupa sumur bor dalam atau sumur dangkal tertutup yang dialirkan dari sumur bor berspesifikasi khusus dan sesuai dengan Permenkes No.49/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Aliran air sumur-sumur ini diharapkan dapat kurang dari 30 menit sampai ke Sambungan Rumah (SR) warga pemanfaat, sehingga *eligibility* akses air minum aman dapat tercapai di lokasi tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari Laporan SPM Tahun 2023, permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian dua Indikator SPM di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru pada Tahun Anggaran 2023 terdapat satu indikator yang belum mencapai target nasional dikarenakan oleh :

- Layanan PDAM dengan sistem pembayaran berlangganan kurang diminati oleh masyarakat daerah Cempaka, karena sebagian besar penduduknya adalah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dan kawasan tersebut sebagian besar kawasan permukiman padat penduduk; Usaha meminimalkan hal diatas kiranya perlu dilakukan pendekatan dan sosialisasi ke masyarakat lebih lanjut serta intervensi pemerintah dalam penyediaan akses air minum aman untuk masyarakat, sehingga diperlukan penganggaran kembali pada tahun berikutnya, dan diharapkan target akan tercapai secara maksimal.

Dengan disusunnya laporan tahunan ini diharapkan menjadi bahan koreksi dan pedoman bagi pelaksanaan upaya pencapaian visi SKPD selain itu laporan tahunan ini sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan sebagai media pertanggungjawaban publik sehingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru diharapkan menjadi salah satu SKPD andalan Pemerintah Kota Banjarbaru.

Penyusunan Laporan Tahunan ini masih jauh dari sempurna dan bersifat terbuka untuk diadakan koreksi dan penyesuaian serta perbaikan dimasa mendatang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

B. SARAN

Pelaksanaan Kinerja Dinas pada Tahun Anggaran 2023, pada umumnya seluruh program dan kegiatan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Akan tetapi untuk mencapai hasil yang ideal memang diperlukan strategi dan intervensi baik berupa pemberian pemahaman terhadap masyarakat dimaksud serta melibatkan beberapa stake holder serta peningkatan kapasitas SDM yang sesuai dengan bidang dan tugasnya, untuk itu kami telah melakukan langkah-langkah yang berkesinambungan melalui rapat koordinasi.

Banjarbaru, Maret 2024
Kepala Dinas

EKA YULIESDA AKBARI, ST. MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730727 199803 2 008

LAMPIRAN FOTO KEGIATAN PADA TAHUN 2023

Nama Pekerjaan	:	Peningkatan Jalan Peramuhan Ujung (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 1)
Nomor Kontrak	:	621/04/SP/REKON.JL-1/DPUPR/2023
Nilai Kontrak	:	Rp. 1.847.929.000,00
Kontraktor Pelaksana	:	PT. BIMO LAKSANA GROUP
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender
Konsultan Pengawas	:	CV. Arsa Delapan

FOTO VISUAL (0%) PENINGKATAN JALAN PERAMUAN UJUNG (LANJUTAN) KEL. LANDASAN ULIN TENGAH (PAKET 1)	
 PAKET : Peningkatan Jalan Peramuhan Ujung (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 1) KONTRAKTOR : PT Bimo Laksana Group KONSULTAN : CV Arsa Delapan PEKERJAAN : Pengukuran awal POSISI : Tengah STA : 1+585	 PAKET : Peningkatan Jalan Peramuhan Ujung (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 1) KONTRAKTOR : PT Bimo Laksana Group KONSULTAN : CV Arsa Delapan PEKERJAAN : Pengukuran awal POSISI : Tengah STA : 1+850
STA 1+585	STA 1+850
 PAKET : Peningkatan Jalan Peramuhan Ujung (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 1) KONTRAKTOR : PT Bimo Laksana Group KONSULTAN : CV Arsa Delapan PEKERJAAN : Pengukuran awal POSISI : Tengah STA : 2+150	 PAKET : Peningkatan Jalan Peramuhan Ujung (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 1) KONTRAKTOR : PT Bimo Laksana Group KONSULTAN : CV Arsa Delapan PEKERJAAN : Pengukuran awal POSISI : Tengah STA : 2+450
STA 2+150	STA 2+450





STA 4+031



STA 4+031 (2)

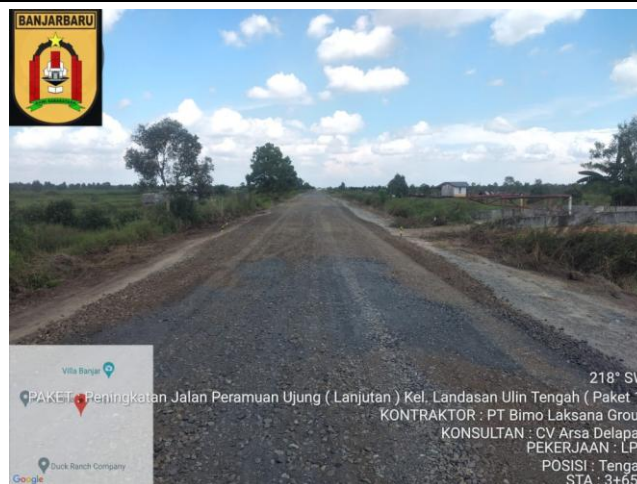
FOTO VISUAL (50%)
PENINGKATAN JALAN PERAMUAN UJUNG (LANJUTAN) KEL. LANDASAN ULIN TENGAH (PAKET 1)



STA 1+650



STA 1+850

 214° SW PAKET : Peningkatan Jalan Peramuhan Ujung (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 1) KONTRAKTOR : PT Bimo Laksana Grup KONSULTAN : CV Arsa Delapan PEKERJAAN : Lpb POSISI : Tengah STA : 2+150	 3.47226219S 114.73012624E Konsultan Pengawas : CV Arsa Delapan Kontraktor Pelaksana : PT Bimo Laksana Grup Paket Peningkatan jalan peramuhan ujung (lanjutan) paket 1 Pekerjaan : LFA kelas B Sta 2+250
STA 2+150  3.47298766S 114.72965349E Konsultan Pengawas : CV Arsa Delapan Kontraktor Pelaksana : PT Bimo Laksana Grup Paket Peningkatan jalan peramuhan ujung (lanjutan) paket 1 Pekerjaan : LFA kelas B Sta 2+600	STA 2+250  3.47592087S 114.72756421E Konsultan Pengawas : CV Arsa Delapan Kontraktor Pelaksana : PT Bimo Laksana Grup Paket Peningkatan jalan peramuhan ujung (lanjutan) paket 1 Pekerjaan : LFA kelas B Sta 3+050
STA 2+600  3.47775958S 114.72636509E Konsultan Pengawas : CV Arsa Delapan Kontraktor Pelaksana : PT Bimo Laksana Grup Paket Peningkatan jalan peramuhan ujung (lanjutan) paket 1 Pekerjaan : LFA kelas B Sta 3+350	STA 3+050  218° SW PAKET : Peningkatan Jalan Peramuhan Ujung (Lanjutan) Kel. Landasan Ulin Tengah (Paket 1) KONTRAKTOR : PT Bimo Laksana Grup KONSULTAN : CV Arsa Delapan PEKERJAAN : Lpb POSISI : Tengah STA : 3+650
STA 3+350	STA 3+650





STA 4+031

STA 4+031 (2)

FOTO VISUAL (100%)

PENINGKATAN JALAN PERAMUAN UJUNG (LANJUTAN) KEL. LANDASAN ULIN TENGAH (PAKET 1)



STA 1+600

STA 1+850



STA 2+150

STA 2+450



**FOTO KEGIATAN SUB KEGIATAN : PERLUASAN SPAM JARINGAN
PERPIPAAN DI KAWASAN PERKOTAAN**

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam terlindungi Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka (Paket 1)
Nomor Kontrak	:	600.1.16.2/03/SP/AM-1/CK/DPUPR/2023
Nilai Kontrak	:	Rp. 1.511.904.608,00
Kontraktor Pelaksana	:	CV. BIMA KARYA
Waktu Pelaksanaan	:	120 (seratus dua puluh) hari kalender
Konsultan Pengawas	:	CV. KALIMANTAN ENGINEERING

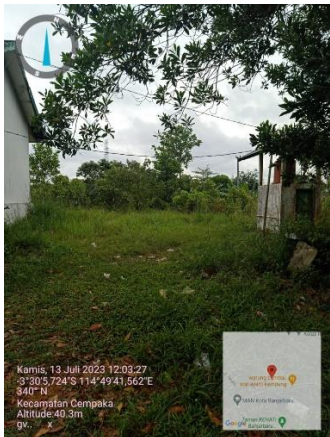
RT. 17



RT. 41	
 3°29'31"S 114°51'23"E Kecamatan Cempaka Jalur Pipa RT. 41 Kel. Cempaka	 3°29'31"S 114°51'23"E Kecamatan Cempaka Jalur Pipa RT. 41 Kel. Cempaka
 3°29'31"S 114°51'19"E 229° SW Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan narsum 25 Nov 2023 15:49:52	 3°29'31"S 114°51'23"E Kecamatan Cempaka Jalur Pipa RT. 41 Kel. Cempaka
 3°29'29"S 114°51'17"E Pasangan SR No. 3 Rt. 41 Cempaka	 3°29'29"S 114°51'17"E Kecamatan Cempaka Pasangan SR No. 3 Rt. 41 Cempaka

RT. 26	
 -3°32'10", 114°52'24", 124,0m, 203° 13/07/2023 11:29:12	 3°32'9", 114°52'24", 117,0m, 358° 13/07/2023 11:29:27
 -3°32'20" S 114°52'18" E Jalur pipa RT. 26 STA. 600	 -3°32'13" N - 114°52'23" 90° E Pasangan SR.no.20 RT. 26 Kec. Cempaka
 -3°32'12,486" S 114°52'24,624" E Pasangan SR.no.18 RT. 26 Kec. Cempaka	 3°32'12,45" S 114°52'24,738" E Pasangan SR.no.17 RT. 26 Kec. Cempaka

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA)/Broncaptering/Sumur Dalam terlindungi Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka (Paket 2)
Nomor Kontrak	:	600.1.16.2/03/SP/AM-2/CK/DPUPR/2023
Nilai Kontrak	:	Rp. 991.509.700,00
Kontraktor Pelaksana	:	CV. DRILL TEKNIK
Waktu Pelaksanaan	:	120 (seratus dua puluh) hari kalender
Konsultan Pengawas	:	CV. PRIMA TEKNIK CONSULINDO

 Kamis, 13 Juli 2023 12:03:27 3°30'5,724"S 114°49'41,562"E 344° N Kecamatan Cempaka Altitude: 40.3m Gv. x	
 Kamis, 21 September 2023 09:21:55 3°31'4,692"S 114°48'40,726"E 337° NW Bangkal Altitude: 24.6m Speed: 0.6km/h Gv. x Index number: 607	

Nama Pekerjaan	:	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin (Paket 3)
Nomor Kontrak	:	600.1.16.2/03/SP/AM-3/CK/DPUPR/2023
Nilai Kontrak	:	Rp. 1.141.908.100,00
Kontraktor Pelaksana	:	CV. ARTOMORO ADHI TIRTA
Waktu Pelaksanaan	:	120 (seratus dua puluh) hari kalender
Konsultan Pengawas	:	CV. PROFIL JASA MANDIRI

Jl. Tambak Buluh

	Decimal	DMS
Latitude	-3.455126	3°27'18" S
Longitude	114.746721	114°44'48" E

Kecamatan Liang Anggang
Kalimantan Selatan
Indonesia

	Decimal	DMS
Latitude	-3.457507	3°27'27" S
Longitude	114.74677	114°44'48" E

Kecamatan Liang Anggang
Kalimantan Selatan
Indonesia

	Decimal	DMS
Latitude	-3.457501	3°27'27" S
Longitude	114.746715	114°44'48" E

Jl. Kenanga



Nama Pekerjaan	:	Pengembangan Jaringan Distribusi dan Sambungan Rumah Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang (Paket 4)
Nomor Kontrak	:	600.1.16.2/03/SP/AM-4/CK/DPUPR/2023
Nilai Kontrak	:	Rp. 1.037.505.500,00
Kontraktor Pelaksana	:	CV. TARUNA JAYA UTAMA
Waktu Pelaksanaan	:	120 (seratus dua puluh) hari kalender
Konsultan Pengawas	:	CV. AMBER CONSULTANT

	
STA 0+00	STA 1+500
	
STA 2+100	

**FOTO PEKERJAAN SUB KEGIATAN : PERENCANAAN, PEMBANGUNAN,
PENGAWASAN DAN PEMANFAATAN BANGUNAN GEDUNG DAERAH
KABUPATEN/KOTA.**

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Gedung Kantor DP2KBMP2A Kota Banjarbaru
Nomor Kontrak	:	600.1.15.2/03/SP/DP2KBMP2A/P4BGDK/CK/DPUPR
Nilai Kontrak	:	Rp. 10.085.232.000,00
Kontraktor Pelaksana	:	CV. JAYA MANDIRI
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender
Konsultan Pengawas	:	CV. PRAKTIRA KONSULTAN





Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tugu Nol Kilometer Kota Banjarbaru
Nomor Kontrak	:	600.1.15.2/03/SP/TUGU 0/P4BGDK/CK/DPUPR
Nilai Kontrak	:	Rp. 1.752.074.000,00
Kontraktor Pelaksana	:	CV. BERSAMA KITA JAYA MAKMUR
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender
Konsultan Pengawas	:	CV. CLOUDYE LOENHA ENGINEERING



**FOTO PEKERJAAN SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN SARANA SISTEM
DRAINASE LINGKUNGAN**

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Sapta Marga Blok B dan C RT.10 RW. 02, Jl. Bina Putra, Jl. Al Hidayah I RT. 08 RW. 02 dan Komplek Berlina Jaya I Kecamatan Landasan Ulin dan sekitarnya (Paket 1)
Nomor Kontrak	:	600.1.14.2/03/SP/PDL-1/CK/DPUPR/2023
Nilai Kontrak	:	Rp. 2.149.248.500,00
Kontraktor Pelaksana	:	PT. ARTA ANUGERAH ADHI PERKASA
Waktu Pelaksanaan	:	150 (seratus lima puluh) hari kalender
Konsultan Pengawas	:	CV. FIAZTA MATRIX CONSULTANT



Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Drainase Lingkungan Kelurahan Guntung Manggis, Kelurahan Landasan Ulin Timur dan Kelurahan Syamsudin Noor Kecamatan Landasan Ulin (Paket 2)
Nomor Kontrak	:	600.1.14.2/03/SP/PDL-2/CK/DPUPR/2023
Nilai Kontrak	:	Rp. 1.388.975.000,00
Kontraktor Pelaksana	:	CV. SINAR JAYA GRUP
Waktu Pelaksanaan	:	150 (seratus lima puluh) hari kalender
Konsultan Pengawas	:	CV. MULTI TATA LAKSANA

 25 Jul 2023 08.47.57 -3°28'12,702"S 114°47'58,638"E 13° N Guntungmanggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan Drainase Wengga Kuda	 29 Jul 2023 10.14.22 -3°28'12,882"S 114°47'58,074"E 36° NE Guntungmanggis Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjar Baru Kalimantan Selatan Drainase Wengga Kuda
 12 Agu 2023 09.31.52 -3°28'11,202"S 114°48'0,144" E 222° SW Drainase Wengga kuda	

**FOTO PENGADAAN ALAT BERAT SUB KEGIATAN : PENYEDIAAN JASA
PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN ALAT BESAR**

Nama Pekerjaan	:	Belanja Modal Excavator (Pembelian Alat Berat Excavator Mini)
Nomor SP	:	000.3.2/023/EXC-MINI/SP/PK/DPUPR Tanggal : 20 Nopember 2023
Nilai Kontrak	:	Rp 1.209.960.000,00
Penyedia	:	CV. Kana Surya Perkasa
Waktu Pelaksanaan	:	30 (tiga puluh) hari kalender

**FOTO VISUAL
ALAT BERAT EXCAVATOR MINI**



Nama Pekerjaan	:	Belanja Modal Excavator (Pembelian Alat Berat Excavator Long Arm)
Nomor SP	:	000.3.2/022/EXC-LONGARM/SP/PK/DPUPR Tanggal : 20 Nopember 2023
Nilai Kontrak	:	Rp 2.069.000.000,00
Penyedia	:	CV. Kana Surya Perkasa
Waktu Pelaksanaan	:	30 (tiga puluh) hari kalender

**FOTO VISUAL
ALAT BERAT EXCAVATOR LONG ARM**



FOTO PEKERJAAN SUB KEGIATAN : REHABILITASI JALAN

Nama Paket	:	Rehabilitasi Jalan Sutomo Barat, Jalan Agus Salim Barat, Jalan Agus Salim Timur, Jalan Jendral Sudirman (Kel.Komet), Jalan Pangeran Antasari, Jalan Basuki Rahmat, Jalan Pangeran Antasari Minggu Raya, Jalan Basuki Rahmat Minggu Raya (Kel.Komet) (Paket 1)
Nomor Kontrak	:	621/04/SP/REHAB.JL-1/DPUPR/2023,
Nilai Kontrak	:	Rp. 3.580.336.000,00(Termasuk PPN 11%)
Masa Pelaksanaan	:	150 hari kalender
Konsultan Pengawas	:	CV. SR ARTO ENGINEERING

FOTO VISUAL PEKERJAAN



Foto Pengukuran



Foto Pelaksanaan



Foto Pelaksanaan



Foto Pelaksanaan

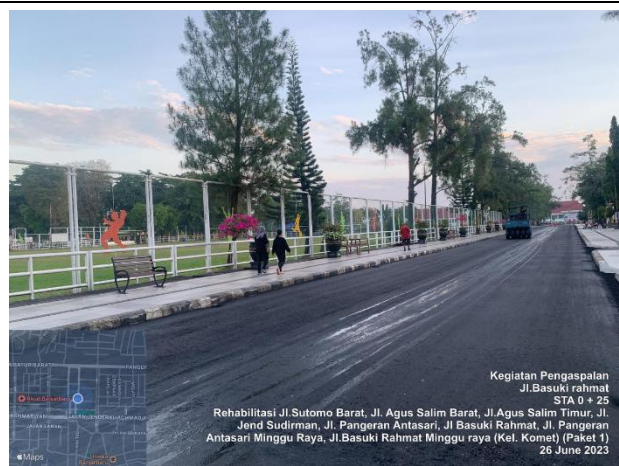
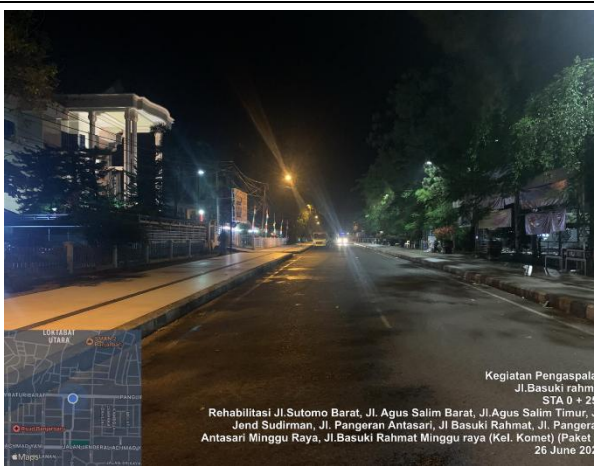


Foto Pelaksanaan

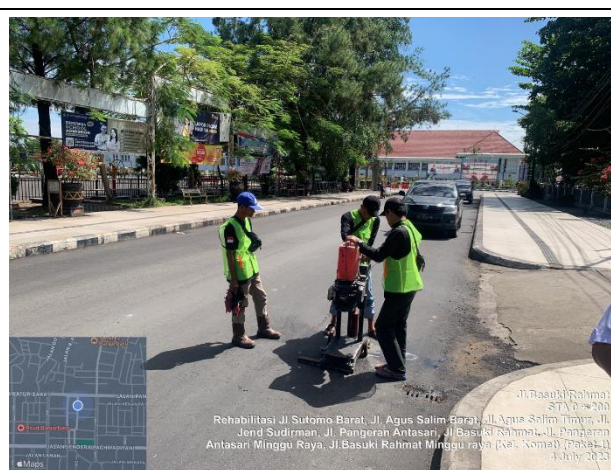


Foto Opname



Foto Opname

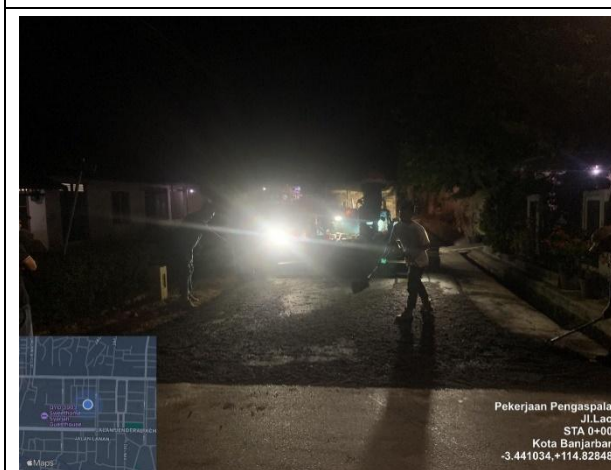


Foto Pelaksanaan



Foto Pelaksanaan



Foto Pemeriksaan BPK



Foto Pemeriksaan BPK

**FOTO PEKERJAAN SUB KEGIATAN : PEMBANGUNAN/PENYEDIAAN SUB
SISTEM PENGOLAHAN SETEMPAT**

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka
Nomor Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 777.000.000,00
Pelaksana	:	KSM SEKATA
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

 Decimal DMS Latitude 40.726767 40°43'36" N 22°C Longitude -74.077549 74°43'9" W 72°F	 Decimal DMS Latitude -3.492706 3°29'33" S 32°C Longitude 114.850895 114°51'3" E 90°F
 Decimal DMS Latitude -3.492106 3°29'31" S 32°C Longitude 114.851114 114°51'4" E 90°F	 Decimal DMS Latitude -3.494079 3°29'38" S 33°C Longitude 114.851188 114°51'4" E 91°F
 Decimal DMS Latitude -3.492899 3°29'34" S 28°C Longitude 114.853942 114°51'14" E 82°F	 Decimal DMS Latitude -3.493599 3°29'36" S 28°C Longitude 114.854946 114°51'17" E 82°F

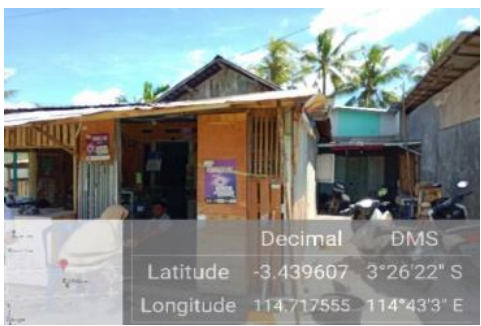
	
---	--

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan
Nomor Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 350.000.000,00
Pelaksana	:	KSM KARYA BERSAMA LOKSEL
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender



Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Utara Kecamatan Liang Anggang
Nomor Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 1.120.000.000,00
Pelaksana	:	KSM BERKAT BERSAMA
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

 Decimal DMS Latitude -3.428201 3°25'41" S Longitude 114.729255 114°43'45" E	 Decimal DMS Latitude -3.41648 3°24'59" S Longitude 114.737163 114°44'13" E
 Decimal DMS Latitude -3.405875 3°24'21" S Longitude 114.739545 114°44'22" E	 Decimal DMS Latitude -3.439607 3°26'22" S Longitude 114.717555 114°43'3" E
 Decimal DMS Latitude -3.41567 3°24'56" S Longitude 114.738224 114°44'17" E	 Decimal DMS Latitude -3.44236 3°26'32" S Longitude 114.713711 114°42'49" E

	
---	--

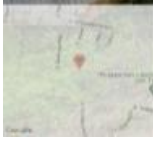
Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang
Nomor Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 406.000.000,00
Pelaksana	:	KSM AMANAH BERSAMA
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

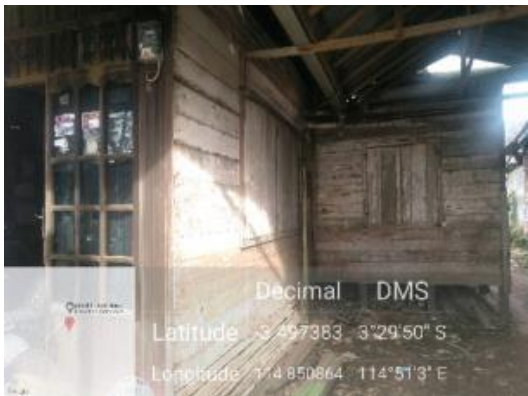
 Decimal DMS Latitude -3.448601 3°26'54" S Longitude 114.713188 114°42'47" E	 Decimal DMS Latitude -3.449664 3°26'58" S Longitude 114.712963 114°42'46" E
 Decimal DMS Latitude -3.446614 3°26'47" S Longitude 114.69795 114°41'52" E	 Decimal DMS Latitude -3.447381 3°26'50" S Longitude 114.697651 114°41'51" E

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin
Nomor Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 672.000.000,00
Pelaksana	:	KSM BUNGA KARANG
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

 Decimal DMS Latitude -3.457153 3°27'25" S Longitude 114.740432 114°44'25" E 2023-03-24 (Jum) 10:13 (AM)	 Decimal DMS Latitude -3.452729 3°27'9" S Longitude 114.755586 114°45'20" E
---	---

 <table><tr><th></th><th>Decimal</th><th>DMS</th></tr><tr><td>Latitude</td><td>-3.447123</td><td>3°26'49" S</td></tr><tr><td>Longitude</td><td>114.766177</td><td>114°45'58" E</td></tr></table> 2023-04-26(Rab) 11:41(AM)		Decimal	DMS	Latitude	-3.447123	3°26'49" S	Longitude	114.766177	114°45'58" E	 <table><tr><th></th><th>Decimal</th><th>DMS</th></tr><tr><td>Latitude</td><td>-3.458974</td><td>3°27'32" S</td></tr><tr><td>Longitude</td><td>114.7539</td><td>114°45'14" E</td></tr></table> 2023-04-29(Sab) 09:11(AM)		Decimal	DMS	Latitude	-3.458974	3°27'32" S	Longitude	114.7539	114°45'14" E
	Decimal	DMS																	
Latitude	-3.447123	3°26'49" S																	
Longitude	114.766177	114°45'58" E																	
	Decimal	DMS																	
Latitude	-3.458974	3°27'32" S																	
Longitude	114.7539	114°45'14" E																	
 <table><tr><th></th><th>Decimal</th><th>DMS</th></tr><tr><td>Latitude</td><td>-3.453242</td><td>3°27'11" S</td></tr><tr><td>Longitude</td><td>114.756468</td><td>114°45'23" E</td></tr></table> 2023-04-29(Sab) 11:37(AM)		Decimal	DMS	Latitude	-3.453242	3°27'11" S	Longitude	114.756468	114°45'23" E	 <table><tr><th></th><th>Decimal</th><th>DMS</th></tr><tr><td>Latitude</td><td>-3.454853</td><td>3°27'17" S</td></tr><tr><td>Longitude</td><td>114.758698</td><td>114°45'31" E</td></tr></table> 2023-05-02(Sel) 05:09(PM)		Decimal	DMS	Latitude	-3.454853	3°27'17" S	Longitude	114.758698	114°45'31" E
	Decimal	DMS																	
Latitude	-3.453242	3°27'11" S																	
Longitude	114.756468	114°45'23" E																	
	Decimal	DMS																	
Latitude	-3.454853	3°27'17" S																	
Longitude	114.758698	114°45'31" E																	
 <table><tr><th></th><th>Decimal</th><th>DMS</th></tr><tr><td>Latitude</td><td>-3.451183</td><td>3°27'4" S</td></tr><tr><td>Longitude</td><td>114.744667</td><td>114°44'40" E</td></tr></table> 2023-05-04(Kam) 05:37(PM)		Decimal	DMS	Latitude	-3.451183	3°27'4" S	Longitude	114.744667	114°44'40" E	 <table><tr><th></th><th>Decimal</th><th>DMS</th></tr><tr><td>Latitude</td><td>-3.449515</td><td>3°26'58" S</td></tr><tr><td>Longitude</td><td>114.744074</td><td>114°44'38" E</td></tr></table> 2023-05-04(Kam) 09:45(AM)		Decimal	DMS	Latitude	-3.449515	3°26'58" S	Longitude	114.744074	114°44'38" E
	Decimal	DMS																	
Latitude	-3.451183	3°27'4" S																	
Longitude	114.744667	114°44'40" E																	
	Decimal	DMS																	
Latitude	-3.449515	3°26'58" S																	
Longitude	114.744074	114°44'38" E																	

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka
Nomor Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 553.000.000,00
Pelaksana	:	KSM BADINGSANAKAN
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Guntung Paikat Kecamatan Banjarbaru Selatan
Nomor Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 350.000.000,00
Pelaksana	:	KSM MAWAR ASRI
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

 Decimal DMS Latitude -3.456743 3°27'24" S Longitude 114.635854 114°50'9" E	 Decimal DMS Latitude -3.448792 3°26'55" S Longitude 114.633091 114°50'2" E
 Decimal DMS Latitude -3.449034 3°26'56" S Longitude 114.635355 114°50'7" E	 Decimal DMS Latitude -3.450428 3°27'1" S Longitude 114.635161 114°50'6" E

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan
Nomor Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 350.000.000,00
Pelaksana	:	KSM SEIBER
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

 Decimal DMS Latitude -3.460357 3°27'37" S Longitude 114.653151 114°51'11" E	 Decimal DMS Latitude -3.462146 3°27'43" S Longitude 114.651607 114°51'16" E
--	---

 Decimal DMS Latitude -3.451669 3°27'55" S Longitude 114.647359 114°50'50" E	 Decimal DMS Latitude -3.450239 3°27'01" S Longitude 114.651356 114°51'14" E
 Decimal DMS Latitude -3.448364 3°26'54" S Longitude 114.641667 114°50'29" E	 Decimal DMS Latitude -3.455103 3°27'18" S Longitude 114.641259 114°50'20" E
 Decimal DMS Latitude -3.447833 3°26'52" S Longitude 114.650595 114°51'12" E	 Decimal DMS Latitude -3.458236 3°27'29" S Longitude 114.654377 114°51'16" E

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan
Nomor Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 350.000.000,00
Pelaksana	:	KSM BATUAH
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Bangkal Kecamatan Cempaka
Nomor Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 364.000.000,00
Pelaksana	:	KSM LINGGANGAN
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

 Decimal DMS Latitude -3.515051 3°30'54" S Longitude 114.815132 114°48'54" E	 Decimal DMS Latitude -3.508416 3°30'30" S Longitude 114.821285 114°49'16" E
 Decimal DMS Latitude -3.521145 3°31'16" S Longitude 114.810581 114°48'38" E	 Decimal DMS Latitude -3.514531 3°30'52" S Longitude 114.813534 114°48'48" E

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang
Nomor Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 350.000.000,00
Pelaksana	:	KSM KEBERSAMAAN
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

 Decimal DMS Latitude -3.507228 3°30'26" S Longitude 114.711513 114°42'41" E	 Decimal DMS Latitude -3.502654 3°30'9" S Longitude 114.711309 114°42'40" E
---	--

 Decimal DMS Latitude -3.498038 3°29'52" S Longitude 114.71119 114°42'40" E	 Decimal DMS Latitude -3.474032 3°28'26" S Longitude 114.708763 114°42'31" E
 Decimal DMS Latitude -3.473801 3°28'25" S Longitude 114.708992 114°42'32" E	 Decimal DMS Latitude -3.471002 3°28'15" S Longitude 114.705112 114°42'18" E
 Decimal DMS Latitude -3.472399 3°28'20" S Longitude 114.705566 114°42'20" E	 Decimal DMS Latitude -3.470038 3°28'12" S Longitude 114.704039 114°42'14" E

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin
Nomor Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 350.000.000,00
Pelaksana	:	KSM HIMALAYA
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

	
---	--

Nama Pekerjaan	:	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka
Nomor Kontrak	:	-
Nilai Kontrak	:	Rp. 350.000.000,00
Pelaksana	:	KSM AIR
Waktu Pelaksanaan	:	180 (seratus delapan puluh) hari kalender

